

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat **BPK RI**) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :

- Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara

- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-
- perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara
- Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK
- Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
- Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
- Membina jabatan fungsional Pemeriksa
- Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan
- Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka yang dapat dirumuskan adalah ***“Software Requirement Specification pada Pelayanan Pengaduan di BPK-RI”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah ditentukan, maka identifikasi masalah dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses bisnis Pelayanan Pengaduan pada perusahaan BPK-RI ?

2. Bagaimana bentuk *Software Requirement Specification* dalam proses bisnis Pelayanan Pengaduan di BPK-RI ?

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.3.1 Maksud Kerja Praktek

Dengan melakukan kerja praktek di BPK-RI dapat mengetahui bagaimana proses bisnis dalam pengaduan ke BPK, cara untuk melakukan pengaduan, dan sampai laporan pengaduan di proses.

1.3.2 Tujuan Kerja Praktek

- Memahami proses bisnis pengaduan dalam BPK-RI
- Membuat *Software Requirement Specification* pada proses bisnis Pelayanan Pengaduan di BPK-RI

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diberikan batasan masalah dalam pembuatan laporan ini, terkait dalam ruang lingkup Pengembangan dalam Pelayanan Pengaduan di BPK-RI, yaitu :

- Menganalisa proses bisnis dalam Pelayanan Pengaduan dengan metode SRS pada BPK-RI

1.5 Manfaat Penulisan.

- Bagi mahasiswa sebagai media pembelajaran dalam memahami proses bisnis perusahaan dan membuat *Software Requirement Specification* berdasarkan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah.
- Bagi Perusahaan sebagai referensi untuk membantu dalam perbaikan proses bisnis Pelayanan Pengaduan

1.6 Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan dalam menyusun Laporan Kerja Praktik ini melakukan Metode Pengumpulan Data sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam rangka menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini sesuai dengan yang diharapkan dan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan, maka penulis menggunakan metode diantaranya yaitu :

1. Wawancara

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan proses bisnis Pelayanan Pengaduan di BPK-RI.

2. Observasi

Data diperoleh dengan pengamatan langsung yang dilakukan ketika kerja praktik di BPK-RI bagian biro IT.

3. Tinjauan Pustaka

Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca beberapa buku yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan dan judul.

Metode pengumpulan data yang didapat dari buku serta bahan-bahan bacaan lain yang bersangkutan dengan data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan Laporan Kerja Praktek.

1.7 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang disusun dalam laporan ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, tujuan kerja praktik, sistematika penulisan laporan kerja praktik.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan Judul

Laporan kerja praktik.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum perusahaan, visi, misi, lokasi tempat kerja, struktur organisasi, tugas dan wewenang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi proses bisnis yang berjalan, identifikasi masalah, solusi, dan metode yang digunakan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penyusunan laporan.

